

**KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL
(Studi Terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Eky Fitra Hariyanto

NPM. 1746041027



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL (Studi Terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)

Oleh

Eky Fitra Hariyanto

Permasalahan kesejahteraan sosial masih terjadi di Kota Bandar Lampung, salah satunya adalah eksploitasi anak yang sering tampak di sekitaran kota. Dimana mereka yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan namun masih memiliki hubungan dengan keluarga sehingga setelah kegiatan selesai mereka kembali kerumah. Dengan begitu dibutuhkan suatu upaya oleh pemerintah daerah untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama eksploitasi anak perak (*silver*) di Kota Bandar Lampung, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan koordinasi. Koordinasi memiliki peran penting dalam hal suksesnya suatu kebijakan termasuk dengan perlindungan anak disekitar informal terutama anak silver. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakakukan oleh pemerintah dalam penanganan anak jalanan terutama anak silver. Adapun metode yang digunakan ilaah dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan sudah ada koordinasi antar lembaga pemerintah dala penanganan anak silver namun pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan banyaknya program yang dilakukan sehingga tidak berjalan maksimal.

Kata Kunci : Koordinasi Antar Lembaga, Anak *Silver*

ABSTRACT

INTER-AGENCY COORDINATION IN HANDLING INFORMAL SECTOR CHILD WORKER EXPLOITATION (Study of Silver Child Labor in Bandar Lampung City)

**By
Eky Fitra Hariyanto**

Social welfare problems still occur in the city of Bandar Lampung, one of which is the exploitation of children which is often seen around the city. Where are those who have economic activities on the streets but still have a relationship with their families so that after the activities are finished they return home. Thus, an effort is needed by the local government to overcome people with social welfare problems, especially the exploitation of child silver (silver) in the city of Bandar Lampung, the efforts made by the government are coordination. Coordination has an important role in the success of a policy including the protection of children around informal, especially silver children. The purpose of this research is to find out how the coordination is carried out by the government in handling street children, especially silver children. The method used is a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation techniques. The results of the research show that there is coordination between government agencies in handling silver children, but the implementation is still not optimal due to a lack of facilities and infrastructure due to the many programs being carried out so that they do not run optimally.

Keywords: Inter-Agency Coordination, Silver Children

**KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL
(Studi Terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Eky Fitra Hariyanto

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGANAN EKSPLOITASI PEKERJA
ANAK SEKTOR INFORMAL (Studi Terhadap
Pekerja Anak Silverdi Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Eky Fitra Hariyanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746041027

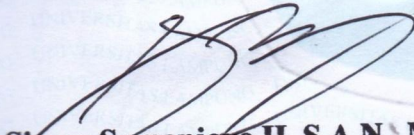
Bagian

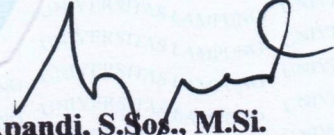
: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

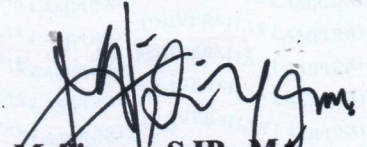
: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik




Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.AP.
NIP. 19810628 200501 1 003


Apandi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19620707 198303 1 005

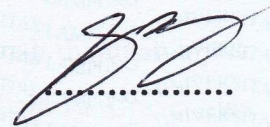
2. Ketua Bagian Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., MA.
NIP. 19740520 200112 2 002

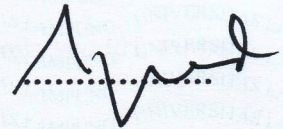
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

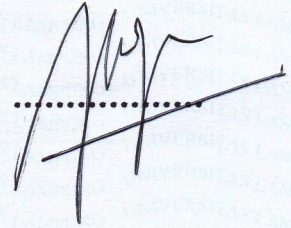
Ketua : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.**



Sekretaris : **Apandi., S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Novita Tresiana., S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Juli 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 23 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



EKY FITRA HARIYANTO

NPM. 1746041027

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertaman dari dua bersaudara dari pasangan Didit Tri Hariyanto dan Hiliyansuri. Penulis tercatat pertama kali bersekolah di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari. Setelah menamatkan pendidikan Taman Kanak-Kanak penulis meneruskan pendidikan kejenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Palapa Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung tahun 2006 hingga 2011. Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar penulis meneruskan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP 23 Bandar Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Penulis melanjutkan sekolah di SMAN 10 Bandar Lampung 2014 hingga tahun 2017.

Selepas masa SMA, penulis mencoba mendaftarkan diri di Akademi imigrasi dan tidak berhasil lulus. Kemudian melanjutkan studinya di jurusan Ilmu Administrasi Negara UNILA melalui jalur PARALEL pada tahun 2017. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai kepala bidang Hubungan Masyarakat HMJ Administrasi Negara periode 2019-2020 dengan program kerja Fieldtrip, Hima Action dan juga penulis ikut serta aktif dalam kegiatan lain yaitu futsal angkatan dan acara-acara lainnya. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada saat PKL penulis menerapkan apa saja yang sudah di dapat di perkuliahan. Setelah melaksanakan PKL semester setelahnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur setelah Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan penulis juga aktif di organisasi diluar kampus yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan mengembangkan bisnis pembesaran budidaya ikan nila sistem bioflok (NJA GROUP) hingga saat ini. setelah berkulat lama akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada tanggal 26 Juli 2023.

MOTTO

“Jangan menciptakan film horor kamu di otak kamu sendiri, kamu akan hidup disurga mu sendiri .”

(Eky Fitra Hariyanto)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S YASIN : 40)

“Tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang selalu menunggu, tapi waktu yang tepat akan hadir kepada orang yang senantiasa bergerak”

(El Dits Hariyanto)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya ini untuk:*

Bapak dan Ibu Tercinta,

Ayah tercinta Didit Tri Hariyanto dan Ibu ku tersayang Hiliyansuri Skripsi ini merupakan tanda bukti terimakasih kepada kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, melindungi dan merawatku sepenuh hati serta selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan cita-citaku setiap langkahku sampai hari ini, esok, dan selanjutnya..

Adik tersayang

Satria Habib Hariyanto Skripsi ini abang persembahkan untuk kamu sebagai rasa terimakasih abang atas doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada abang.

*Keluarga besar dan sahabat,
yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa

*Almamater Tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG.*

SANWACANA



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAMPENANGANAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL (Studi Terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S. A. N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA, selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak Simon untuk segala bimbingan, saran serta masukan yang Bapak berikan kepada saya untuk saya dapat memperbaiki skripsi. Seluruh saran dan masukan yang telah pak Bambang berikan merupakan sebuah wawasan dan pelajaran baru bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Bapak.
2. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. , selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih bapak Apandi untuk kesediannya membimbing dan memberikan saya ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Semoga ibu senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.

3. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si., selaku dosen penguji. Terima kasih Ibu Novita untuk kesediannya mengoreksi skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini dapat selesai, memberikan masukan dan tambahan ilmu bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Miss Intan.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya. Saran dan masukan dari Bapak sangat membantu saya saat dibangku perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan dan kesehatan.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa, Semoga ilmu bermanfaat yang telah diberikan dapat menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir seumur hidup Bapak dan Ibu.
8. Seluruh Staf Ilmu Administrasi Negara terutama Mba Wulan, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga saya lulus.
9. Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar, terimakasih telah membantu saya dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini bisa selesai seperti sekarang
10. Kedua orang tua Ayah tercinta Didit Tri Hariyanto dan Ibu ku tersayang Hiliyansuri yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Adikku tercinta Satria Habib Hariyanto, yang selalu menghibur, menjadi semangat abang dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga adek kelak menjadi apa yang adek cita citakan.
12. Kepada saudara-saudaraku Tubagus Arvin Yozadia Ananta, Farrel Andwian Al-Ghazalli, Dian Febiola, Derian Subagio, Ramadhan Raga Rahman, dan Ahmad Fauzan terimakasih atas dukungan, hiburan, serta keperdulian yang selalu diberikan
13. Kepada Sahabatku Puja Pratama, Mutawakkil Abdan, Lutfhi Alhazmi munandar, Joko Setiawan, Andri Pratama terimakasih atas bantuan, dukungan, keperdulian, dan hiburan yang selalu diberikan selama mengerjakan skripsi hingga selesai
14. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.
15. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi tanpa terkecuali, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis ini selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhawahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023
Penulis

EKY FITRA HARIYANTO
1746041027

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi	15
2.2.1 Definisi	15
2.2.2 Tujuan Koordinasi	16
2.2.3 Sifat-sifat Koordinasi.....	17
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi.....	18
2.2.5 Tipe Koordinasi	20
2.3 Tinjauan Tentang Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	21
2.4 Anak Jalanan	22
2.4.1 Definisi Anak Jalanan.....	22
2.4.2 Karakteristik Anak Jalanan.....	24
2.5 Eksploitasi Anak.....	26
2.6 Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	37

3.4 Sumber Data.....	37
3.4.1 Data Primer.....	37
3.4.2 Data Sekunder	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Obervasi.....	40
3.5.2 Wawancara	40
3.5.3 Dokumentasi.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1 Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	41
3.6.2 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	42
3.6.3 Penyajian Data (<i>Display Replay</i>).....	42
3.6.4 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>).....	42
3.7 Teknik Keabsahan Data	43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	47
4.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	47
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	48
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Bandar Lampung	48
4.1.4 Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	49
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak <i>Silver</i>	51
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi	58
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan anak jalanan	64
4.3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Koordinasi.....	71

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian	9
Tabel 2. Data Informan	38
Tabel 3. Matriks Penilaian Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Anak Jalanan.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	Halaman
Gambar 1 Jumlah Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	8
Gambar 2 Kerangka Penelitian	32
Gambar 3 Model analisis interaktif Miles dan Huberman	43
Gambar 4 Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Berbagai macam cara pada sumber yang sama)	44
Gambar 5 Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data (Satu teknik pengumpulan data pada berbagai macam sumber data A,B,C).....	45
Gambar 6 Diagram Alur Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Anak Jalanan.....	80

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang menginginkan untuk hidup sejahtera dan tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial merupakan hal yang ingin dicapai setiap orang ataupun setiap kelompok, kesejahteraan sosial dikatakan telah tercapai apabila sudah terpenuhinya kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sekunder, tetapi tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang layak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 273.879.750 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk yang banyak jika diimbangi dengan kesejahteraan dapat berdampak baik bagi pembangunan negara tersebut. Sebagai negara yang berkembang kesejahteraan sosial menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Kesejahteraan sangat penting untuk keberlanjutan kualitas hidup manusia, serta dibutuhkan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini banyak dan beragam, termasuk masalah kesejahteraan yang tidak merata.

Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih banyak terjadi di setiap daerah di Indonesia, berbagai macam cara dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di daerahnya, namun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih terus bertambah dan belum dapat diatasi Secara Optimal. (Firdaus, 2018)

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ke IV menyatakan bahwasanya pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dari itu pemerintah wajib memberikan pelayanan bagi Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan di dalam UUD 1945 Kembali di sebutkan pada Pasal 34 Ayat 1 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga dia dapat hidup layak dan mengembangkan dirinya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial terdapat beberapa cara untuk mengatasinya 1)melalui rehabilitasi sosial 2)melalui perlindungan sosial 3)melalui pemberdayaan sosial 4)melalui jaminan sosial, dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial bagi warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 (Sirajuddin, dkk. 2016). Konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah merupakan perwujudan *Distribution Of Powers* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Yang berarti sebagian urusan pemerintahan pusat diberikan kepada pemerintah daerah.

Menyelesaikan permasalahan sosial memang sangat kompleks, dibutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya terkecuali yang diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan diberikannya otonomi kepada daerah dilakukan agar terwujudnya keadilan sosial yang merata dengan meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan dan melihat potensi-potensi di daerah agar dapat di kembangkan dan melibatkan peran masyarakat di daerah. Maka dari itu setiap daerah berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi P M. 2019).

Permasalahan kesejahteraan sosial masih terjadi di Kota Bandar Lampung hingga saat ini, salah satunya adalah eksploitasi anak yang sering tampak di sekitaran kota masih berkeliarannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimaksud peyandang adalah mereka yang sering berkeliaran di jalanan dan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial yakni Anak Jalanan dengan kategori yang menggunakan cat *silver* di sekujur tubuhnya yang biasa disebut juga sebagai manusia silver. Dimana mereka yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan namun masih memiliki hubungan dengan keluarga sehingga setelah kegiatan selesai mereka kembali kerumah.

Awal mula tujuan manusia perak (*silver*) ini adalah sebagai bentuk aksi seni yang disebut dengan *body painting* yang biasanya terdapat pada kawasan wisata, dan menggambarkan sebuah fenomena sosial yang terjadi, sehingga nanti para seniman hanya berdiri dengan kotak di depan mereka. Lantas setiap pengunjung yang lewat akan minta foto dan mengisi kotak tersebut dengan uang. Namun, seiring waktu dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus bertambah dan pandemi yang melanda seni *body painting* ini menjadi profesi dan sandaran rezeki dari hanya berdiri menunggu kotak diisi pengunjung, saat ini mereka turun ke jalan dan meminta uang pada setiap pengendara yang lewat dan hal ini sebagian besar dilakukan oleh mereka yang masih berstatus anak di bawa umur atau siswa menengah pertama sehingga disebut sebagai “Anak Silver”. Pada umumnya anak silver ini dipaksa untuk dapat memenuhi kebutuhannya baik oleh orang tua atau kelompok yang diikuti. Fenomena anak silver di kota Bandar Lampung umumnya diorganisir oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeksploitasi anak-anak guna menghasilkan uang (Duta Lampung, 2021).

Anak perak (*silver*) ini sering tampak berkeliaran di persimpangan jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas atau ruas jalan protokol yang padat kendaraan misalnya saja, di persimpangan lampu merah Jalan Sultan Agung dan Jalan Ki Maja Way Halim. Mereka menerapkan berbagai Modus dalam kegiatannya, yang mana hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan di dalam Perda Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 yang dijelaskan dilarang melakukan kegiatan meminta-minta berkelompok atau pun individu dengan berbagai macam cara dan dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak dimana hal ini termasuk dalam perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya. Berikut merupakan data anak jalanan yang tercatat pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Gambar 1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota BandarLampung, 2016-2020

Uraian / Description	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Anak Terlantar	1 438	1 307	1 307	1 307	29
2. Lanjut Usia Terlantar	1 946	1 526	1 604	1 635	628
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	625	266	420	427	900
4. Anak Jalanan	4	4	1	1	61
5. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	4	-	-	-	10
6. Korban Penyalahgunaan NAPZA	98	37	41	43	129
7. Penyandang Cacat	1 062	607	949	820	817
8. Gelandangan Dan Pengemis	57	50	7	8	48
9. Tuna Susila	77	44	47	47	144
10. Bekas Warga Binaan LP (Napi)	144	12	18	19	69
11. Pemulung	380	109	145	151	264

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2020 total anak terlantar adalah sebesar 29 orang sedangkan anak jalanan sebesar 61 orang. Selanjutnya data anak silver yang didapat peneliti melalui kabarsiger.com (2022), pada bulan Juni tahun 2022 terdapat 30 anak yang diamankan oleh pihak

Satpol PP, namun tidak menutup kemungkinan anak silver ini berkurang, karena beberapa anak yang sudah diamankan pada bulan-bulan sebelumnya tetap melakukan aksi dijalanan sebagai anak silver .

Dengan begitu dibutuhkan suatu upaya oleh pemerintah daerah untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama eksploitasi anak perak (*silver*) di Kota Bandar Lampung, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintergrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016, penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan melalui pencegahan, pengurangan resiko, penanganan, dan pemulangan dan reintegrasi sosial. Penyelenggaraan tersebut dapat dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 48 tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak silver. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dalam hal ini penulis akan meneliti terkait kebijakan eksploitasi pekerja anak atau pekerja dibawah umur yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan Sumber Daya Aparatur dan

perlindungan masyarakat, dalam hal ini Satpol PP juga menertibkan anak jalanan termasuk anak silver.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda No 2 tahun 2016, salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah permasalahan pengemis dengan bentuk manusia perak (*silver*) yang marak dilakukan dan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, melalui program Penanganan Anak Jalanan termasuk anak silver oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan diharapkan dapat menjadi upaya yang tepat dalam membantu para manusia perak (*silver*) ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga negara, serta dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Sehingga, mereka dapat merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat normal lainnya dan para pengiat kegiatan yang masih dibawah umur tidak kehilangan hak-haknya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Herri mengatakan bahwa Dinas Sosial kini membantu dalam proses pembinaan manusia silver melalui koordinasi dengan Satpol PP terlebih dahulu menegakan aturan, melakukan tindakan dan penanganan manusia silver. Untuk melakukan pembinaan tersebut, Dinas Sosial menyusun beberapa strategi pembinaan seperti pendataan, pengarahan, pemanggilan pihak keluarga, hingga penandatanganan perjanjian tidak akan mengganggu ketertiban lalu lintas (hasil observasi pada tanggal 3 Oktober 2022 di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

Koordinasi dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi (komunikasi), yang bertujuan untuk menyelaraskan setiap agenda kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi juga didefinisikan sebagai proses pengaturan secara tertib

(terintegrasi) fungsi dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa satuan kerja (unit) maupun organisasi guna mencapai suatu tujuan yang terpadu, efektif, dan efisien (Indarto, 2020).

Koordinasi memiliki peran penting dalam hal suksesnya suatu kebijakan termasuk dengan perlindungan anak disekitar informal terutama anak silver. Penulis akan mendeskripsikan peran dan koordinasi yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam penanganan eksploitasi anak silver tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak Sektor Informal (Studi terhadap Pekerja Anak Silver di Kota Bandar Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak *Silver* ?
2. Apa Sajakah Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak Silver ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai, sebagai jawaban atas masalah penelitian.

1. Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak *Silver*.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak Silver.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah nilai guna, sebagai kontribusi nyata baik untuk subjek yang diteliti, untuk diri peneliti, maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara. Hasil penelitian dapat memberikan nilai guna berupa:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Koordinasi Antar Instansi sebagai Upaya meminimalisir eskpolitasi anak sebagai pengemis jalanan.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menganalisis upaya yang tepat dalam rencana meminimalisir eskpolitasi anak sebagai pengemis jalanan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada masyarakat terkait larangan pemberian sumbangan kepada para pengemis jalanan dan Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dan bahan referensi peneliti dalam melakukan penelitian agar memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan teori maupun konsep. Dengan menggunakan penelitian terdahulu, peneliti dapat belajar dari penelitian lain untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian. Peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan matriks perbandingan penelitian berupa beberapa jurnal terkait yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Penelitian

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
Syamsul Arifin. (2017) Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih menuai berbagai permasalahan seperti: keterbatasanSDM, dana, sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang	Terdapat kesamaan objek penelitianyakni Pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni terkait dengan

	diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.	fokus cara pembinaan anak jalanan secara meluas dalam semua kategori. Sedangkan penulis hanya pada bagian kategori pertama anak jalanan yakni manusia bercat perak atau silver.
<p>Siregar, Yonathan Fransmile Pandapotan (2022)</p> <p>Peranan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Yang Menjadi Manusia Silver</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan merupakan peranan yang imperatif, artinya bersifat wajib melalui upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, dan upaya penanganan berupa: razia, penertiban, pendataan, memberikan bantuan makanan, layanan kesehatan dan pembelajaran keterampilan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan, yaitu: kekurangan dana, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat. Kekurangan dana menyebabkan sarana prasarana tidak terpenuhi</p>	<p>Kesamaan objek yakni Pembinaan anak jalanan : manusia silver</p> <p>Perbedaannya terkait dengan metode pengambilan data yang digunakan peneliti terdahulu yakni dgn penentuan informan secara acak pada dinas terkait dan untuk penelitian penulis menggunakan Deskripsi kualitatif, dengan penentuan informan berdasarkan koordinasi antara lembaga yang berperan penting dalam penelitian ini.</p>
<p>Rachmawati Vita, Faedlulloh Dodi (2021)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi dalam pelaksanaan penanganan anak</p>	<p>Kesamaan Objek Penelitian yakni fokus pada</p>

<p>Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan</p>	<p>jalanan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena ada kondisi penyampaian informasi yang masih kurang efektif. Selanjutnya sumberdaya yang berkaitan dengan staff, <i>information, authority, dan facilities</i> juga masing-masing memiliki kekurangan sehingga kekurangan efektivitas dalam hal sumberdaya kebijakan.</p>	<p>penanganan anak jalanan</p> <p>Perbedaannya Terkait dengan Tujuan Penelitian dimana Penelitian Terdahulu Fokus untuk meneliti tentang bagaimana dinamika pelaksanaan kebijakan peyandang masalah sosial sedangkan peneliti fokus pada upaya yang dilakukan lembaga daerah dalam menanggulangi peyandang masalah sosial.</p>
<p>Sri Wahyuni Noviyanti (2021)</p> <p>Strategi Manusia Perak Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi pada Manusia Perak di Pasar Kemiri Muka, Kota Depok)</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Alasan bekerja karena penghasilan sebagai manusia perak lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, tidak memiliki pekerjaan lain, memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan rendah, dan tidak memiliki modal untuk usaha. (2) Strategi manusia perak memenuhi kebutuhan keluarga yaitu Strategi aktif seperti bekerja setiap hari, anggota keluarga bekerja sebagai manusia perak, bekerja tidak berkelompok, dan bergaya unik. Strategi pasif seperti menabung setiap hari untuk membayar kontrakan, menghemat camilan anak, dan menggunakan pakaian lama. Strategi jaringan seperti</p>	<p>Terdapat kesamaan objek terkait yakni manusia perak (<i>silver</i>)</p> <p>Perbedaannya yakni terkait dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada strategi manusia perak (<i>silver</i>) dalam memnuhi kebutuhan hidupnyasedangk</p>

	berhutang, berperilaku baik kepada orang lain, dan memanfaatkan bantuan sosial. Seseorang bekerja sebagai manusia perak dan melakukan strategi aktif, pasif, dan jaringan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga	an penulis lebih berfokus pada upaya menanggulangi manusia manusia perak (<i>silver</i>).
Hartono, A. (2016) Koordinasi antar Lembaga dan Stakeholder dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora dan Taman Ekspresi di Kota Surabaya). <i>Kebijakan dan Manajemen Publik</i> , 4(3)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi TBM seperti faktor komunikasi dan faktor informasi sudah berjalan dengan baik. Namun faktor sumber daya masih ditemukan kelemahan seperti kurangnya Koordinator Kecamatan. Koordinasi yang ada pada program TBM telah dilaksanakan secara maksimal dan aksesibilitas masyarakat Surabaya terhadap sumber pengetahuan (buku) dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.	Terdapat kesamaan objek terkait yakni koordinasi antar lembaga. Perbedaannya yakni terkait dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus Pengembangan Taman Baca penulis lebih berfokus pada upaya penanganan anak jalanan (<i>silver</i>)
Prianto, A. (2019) Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sejauh ini sudah bekerja dengan melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialisasi, bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi dan dalam mengambil sebuah tindakan masih sering	Terdapat kesamaan objek terkait yakni koordinasi antar lembaga. Perbedaannya yakni terkait dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus Perlindungan anak terhadap

	terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral, perbedaan karakter, perbedaan pendapat terutama dalam pembahasan anggaran yang kemudian menimbulkan miss komunikasi, kemudian dalam mencapai tujuan bersama antar instansi telah melakukan usaha dalam pencapaian hasil yang efektif.	penyalahgunaan narkoba penulis lebih berfokus pada upaya penanganan anak jalanan (<i>silver</i>)
<p>Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019).</p> <p>Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. <i>PA PATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik</i>, 2(2), 28-38.</p>	Hasil penelitian menemukan bahwa koordinasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kota Sukabumi masih belum maksimal karena belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga, komunikasi yang dilakukan antar lembaga tidak intensif, dan pembagian kerja yang belum optimal. Oleh karena itu harus adanya kesatuan tindakan antar lembaga, rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin, adanya pedoman dalam penanganan yang disepakati bersama, serta penyediaan anggaran yang cukup.	<p>Terdapat kesamaan objek terkait yakni koordinasi antar lembaga.</p> <p>Perbedaannya yakni terkait dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar, penulis lebih berfokus pada upaya penanganan anak jalanan (<i>silver</i>)</p>

Sumber: (Syamsul Arifin.2017), (Firdaus, 2018), (Apriyana, 2020). (Sri Wahyuni Noviyanti, 2021). (Hartono, A. 2016), Prianto, A. (2019), Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019).

Dari tujuh penelitian diatas fokusnya membahas tentang:

1. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pembinaan anak jalanan.
2. Peranan Dinas Sosial Kota Medan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Yang Menjadi Manusia Silver
3. Pada penelitian ketiga ini, digunakan teori yang sama dalam hal mendapatkan gambaran proses kebijakan mana yang tidak sesuai sehingga pada saat pelaksanaan kebijakan dapat menemui sebuah kegagalan.
4. Alasan bekerja anak jalanan sebagai pengemis jalanan adalah karena penghasilan sebagai manusia perak lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, tidak memiliki pekerjaan lain, memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan rendah, dan tidak memiliki modal untuk usaha.
5. Pada peneitian inimemperoleh pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial dalam sudut pandang subjek penelitian yaitu koordinasi yang meliputi lembaga- lembaga dan stakeholder.
6. Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka dengan mengacu pada unsur koordinasi
7. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Sukabumi.

Dari tujuh penelitian tersebut memiliki perbedaan, sehingga penulis masuk pada bagian yang belum mendapatkan perhatian yakni pada koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh aktor pelaksana yakni Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP kota Bandar Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung dalam upaya Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak *Silver*

dengan memperhatikan setiap faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi berdasarkan teori Hasibuan.

2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi

2.2.1 Definisi

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam organisasi.

Koordinasi merupakan suatu "pengaturan/penataan" beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. (LAN RI, 2014)

Menurut G.R Terry (2003), Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Hasibuan (2006), Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Awaluddin Djamin dalam Prianto (2019) koordinasi adalah proses kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu

sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Dalam pelaksanaan koordinasi Handyaningrat dalam Rukmanayanti, (2014 : 11), mengatakan bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri untuk bagaimana mengidentifikasi kerjasama untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Tanggungjawab koordinasi terletak pada tugas pimpinan, karena koordinasi menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pimpinan. Bahwa pimpinan dikatakan telah berhasil ketika telah melakukan koordinasi dengan baik.
2. Konsep kesatuan tindakan, karena koordinasi merupakan usaha kerjasama sebagai syarat mutlak terselenggaranya dengan sebaik-baiknya.
3. Adanya proses, karena koordinasi merupakan suatu proses kerja yang terus menerus sehingga proses tersebut bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama sebagai kesatuan dari usaha meminta pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan kegiatan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini penelliti akan melihat koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP kota Bandar Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung dalam upaya Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak *Silver*.

2.2.2 Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaatkoordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.

3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan instansi.

2.2.3 Sifat-sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2006), terdapat beberapa sifat koordinasi yaitu:

1. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
2. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (*scalar principle* = hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus

mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Hasibuan (2006) dalam Audina (2019), faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian

komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku". Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

2.2.5 Tipe Koordinasi

Pada umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi.

1. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordinatiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

2.3 Tinjauan Tentang Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Pemerintah kota Bandar Lampung yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan di kota Bandar Lampung maka dengan penetapan Perda No. 02 tahun 2016, tentang Perlindungan Anak yang ada di Bandar Lampung maka dengan penetapan aturan kebijakan ini peran pemerintah sangat diperlukan guna menanggulangi Eksploitasi Anak sebagai pengemis dalam wujud Manusia perak/silver yang terdapat dalam ruang lingkup masyarakat. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan dinas sosial adalah mencakup masalah masalah sosial yang ada di Kota Bandar Lampung atau di bidang sosial yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2020).

- a. Memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.
- b. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.
- c. Melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2020).

2.4 Anak Jalanan

2.4.1 Definisi Anak Jalanan : Manusia Perak

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari.

Dikutip dari Rachmawati, V & Faedlulloh, D (2021:68) berpendapat bahwa keberadaan anak jalanan dilatarbelakangi oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak jalanan tersebut. Faktanya sebagian besar anak jalanan memang berasal dari keluarga miskin. Hal inilah yang merupakan pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan. Kondisi tersebut terjadi akibat tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (Astri, 2014). Secara Psikologis, anak jalanan adalah anak –anak yang pada suatu taraf tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional yang kuat, Sementara mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya (Suyanto, 2013).

Pada umumnya problem anak jalanan banyak berada di kota-kota, keberadaan mereka pun juga tersebar hampir di seluruh dunia terutama negara berkembang seperti di Indonesia (Mambang & Wahyudi, 2016). Fenomena anak jalanan berhubungan dengan masalah-masalah lain, baik secara internal maupun eksternal, seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, dan keluarga. Mereka korban dari kondisi yang dialami individu, baik internal, eksternal maupun kombinasi keduanya. Munculnya anak jalanan, tidak bisa dilihat dari faktor ekonomi saja, tetapi banyak faktor yang menjadi pemicu, seperti kemiskinan, perhatian keluarga, kenakalan remaja, pola asuh yang salah (Khoirunnisa et al., 2020). Masalah sosial anak jalanan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar. Sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi anak jalanan. Dari beberapa uraian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak jalanan merupakan anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada anak jalanan terutama manusia perak. Keberadaan manusia perak menjadi bukti nyata dampak memburuknya kondisi ekonomi akibat pandemi abad ke-19. Manusia perak merupakan fenomena baru yang meramaikan jalanan, khususnya jalanan kota. Manusia perak diperkirakan menyebar sejak tahun 2020 dan banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung hingga Bandar Lampung. Seperti halnya di Kota Bandar Lampung, terdapat fenomena perilaku manusia yang bertindak sengaja dalam hidup dengan berganti peran, dan karena perubahan tersebut maka terlihat jelas berbeda dengan kepribadian. Manusia Perak pada umumnya adalah orang dewasa atau anak jalanan yang senang mengecat tubuhnya dengan warna perak mengkilap dan mencari nafkah di bawah terik matahari, sehingga menarik perhatian orang yang lewat. Mereka bergerak dalam pantomim, meniru gerakan robot pria dan wanita, serta orang dewasa dan anak-anak (Afrizal dan Risdiana, 2022).

2.4.2 Karakteristik Anak Jalanan

Pembagian karakteristik dan jenis anak jalanan di bagi berdasarkan usia dan pengelompokan sebagai berikut :

a. Berdasarkan usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: *Pertama*, Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. *Kedua*, Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual. *Ketiga*, Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
 1. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya.
 2. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur.
 3. Tidak lagi sekolah.
 4. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun

- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
 1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
 2. 8 – 16 jam berada di jalanan.
 3. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh.
 4. Tidak lagi sekolah .
 5. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
 6. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
 1. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya.
 2. – 5 jam bekerja di jalanan.
 3. Masih bersekolah.
 4. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll.
 5. Usia rata-rata di bawah 14 tahun

- d. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
 1. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
 2. 8 – 24 jam berada di jalanan.
 3. Tidur di jalanan atau rumah orang tua.
 4. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi.
 5. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

2.5 Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri. Tindakan eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk mencapai keuntungan atau tujuan tertentu demi pencapaian pribadi, golongan, dan atau keluarga. Eksploitasi yang dilakukan kepada anak kian merebak, pemerintah pusat meminta Dinas Sosial untuk memberi tindakan

mengenai penjelasan kepada orangtua mengenai eksploitasi anak. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa eksploitasi memiliki arti pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang); mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain). Eksploitasi juga merupakan sebuah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu. Eksploitasi dan dominasi mempunyai sisi yang sama, dominasi merupakan tindakan penaklukan atau penguasaan melalui eksploitasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai oleh salah satu pihak yang mendominasi pihak lain demi keuntungan atau kekuasaan pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Bellis kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya

terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal yang positif bagi perkembangan anak sehingga anak diikutsertakan dalam proses kerja. Sejak kecil anak-anak telah didik untuk bekerja, misalnya di sektor perikanan, nelayan, buruh, pertanian dan lain-lain. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak layak dan dapat membahayakan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran orangtua maupun masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang mahal dan mewah terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini yang menyebabkan anak memasuki dunia kerja. Eksploitasi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Eksploitasi Fisik
- b. Eksploitasi Sosial
- c. Eksploitasi Seksual
- d. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi didorong oleh faktor-faktor tertentu, ada beberapa faktor yang membuat anak tereksploitasi, seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan sosial, dan motivasi pekerja anak dan keluarga.

2.6 Regulasi Terkait Penangan Anak Jalanan

Menurut (Iskandar, 2012), Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor- aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Berdasarkan ketentuan umum UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi negara dan orang tua karena anak merupakan masadepan bangsa serta generasi penerus bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya berkembang, tumbuh dan berprestasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan hak sipil kebebasan.

Faktor utama yang mejadikan anak turun kejalan ialah kemiskinan maka untuk mengatasi maslah tersebut diperlukan kebijakan antisipasif berdasarkan Perda No 2 tahun 2016, salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah permasalahan pengemis dengan bentuk manusia perak (*silver*) yang marak dilakukan dan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, melalui program Penanganan Anak Jalanan termasuk anak silver oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan diharapkan dapat menjadi upaya yang tepat dalam membantu para manusia perak (*silver*) ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebgai warga negara, serta dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Sehingga, mereka dapat merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat normal lainnya dan para pengiat kegiatan yang masih dibawah umur tidak kehilangan hak-haknya.

Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 48 tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak silver.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016, penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan melalui pencegahan, pengurangan resiko, penanganan, dan pemulangan dan reintegrasi sosial. Penyelenggaraan tersebut dapat dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dalam hal ini penulis akan meneliti terkait kebijakan eksploitasi pekerja anak atau pekerja dibawah umur yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja.

Selanjutnya menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan Sumber Daya Aparatur dan perlindungan masyarakat, dalam hal ini Satpol PP juga menertibkan anak jalanan termasuk anak silver.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan acuan penulis guna memberikan batasan-batasan dalam proses penelitian sehingga peneliti dapat terfokus pada suatu titik masalah penelitian. Keberadaan Manusia perak (*silver*) merupakan sebuah bukti nyata dampak yang ditimbulkan dari akibat kondisi ekonomi yang menjadi permasalahan di kota-kota besar Indonesia. Begitu juga Di Kota Bandar Lampung. Maraknya keberadaan manusia perak (*silver*) sebagai pengemis jalan menjadi sebuah isu publik yang harus segera ditanggulangi

dengan tepat dan efektif. Keberadaan manusia perak (*silver*) dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum terlebih cara yang digunakan mereka untuk meminta sumbangan dengan cara pemaksaan sehingga hal ini sangat meresahkan masyarakat. Sejatinya sebagian besar manusia perak ini merupakan anak jalanan kategori pertama dimana mereka melakukan kegiatan ini hanya untuk memenuhi kegiatan ekonominya dan mereka masih memiliki keluarga sehingga tidak sepenuhnya mereka berada di jalan.

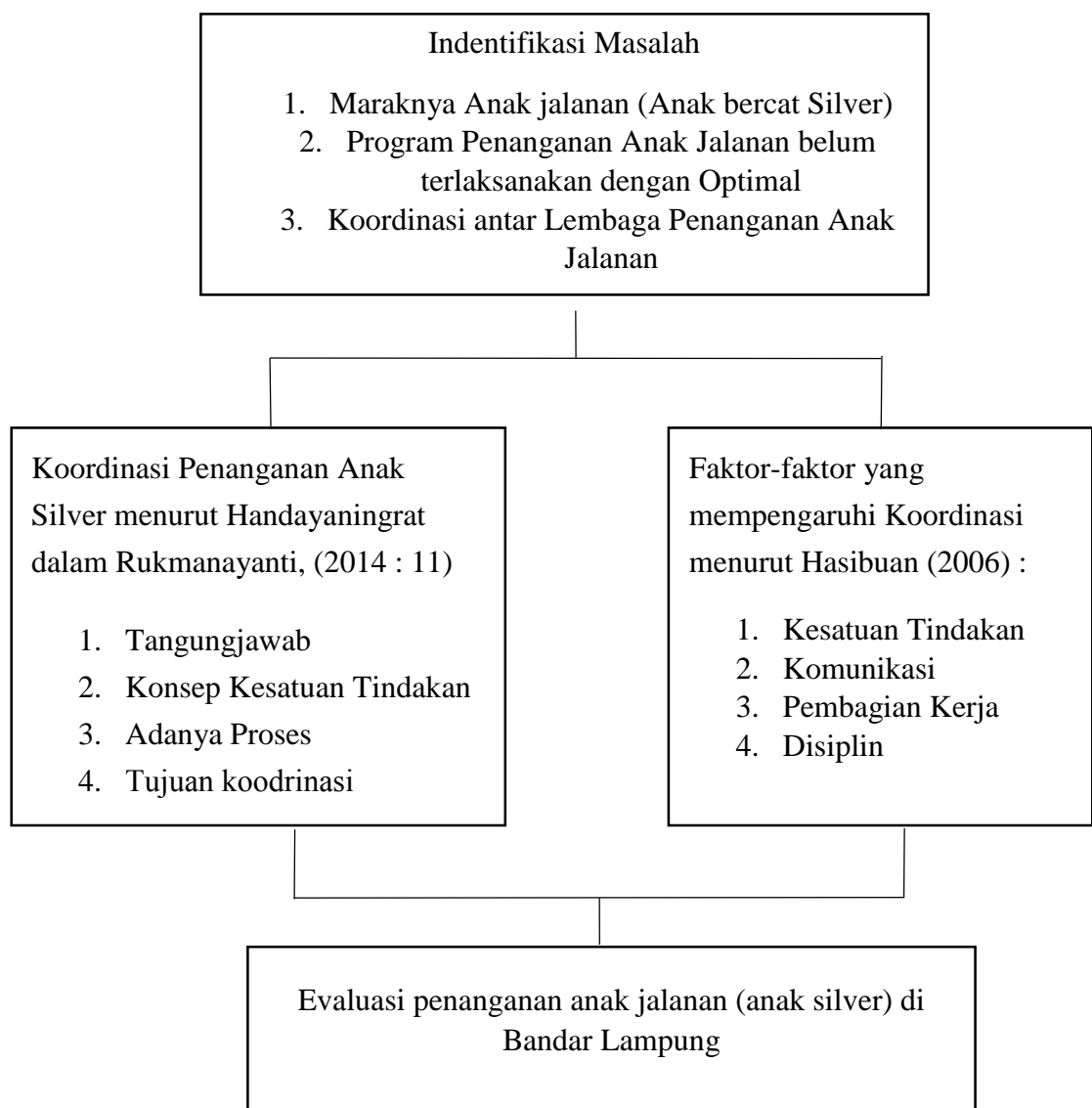
Selain itu, individu yang terlibat dalam aktivitas manusia perak (*silver*) adalah rata-rata anak-anak usia sekolah maupun dibawa umur yang seharusnya mereka mendapatkan pemenuhan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sipil dan sosial. Namun, karena tidak terpenuhinya kebutuhan diatas yang kemudian menyebabkan mereka terpaksa memenuhi kebutuhannya dengan cara mengemis dalam wujud manusia perak (*silver*). Penggunaan cat perak yang dilumurkan keseluruh tubuh dapat berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang belum lagi jika cat ini terserap akibat terlalu lama berada di bawah terik matahari dapat mempengaruhi kesehatan.

Sangat dibutuhkannya peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak dan koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak perlu di maksimalkan karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada anak itu perlu ditangani dengan kerja nyata dan kerja bersama, khususnya pemerintah daerah Bandar Lampung yang berakitan dengan perlindungan anak.

Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung harus memiliki koordinasi yang kuat dengan Dinas Tenaga Kerja, dan Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi mereka peyandang masalah kesejahteraan sosial anak (PMKS), sehingga kedepannya hal ini dapat mencegah pelanggaran hukum yang mengancam tumbuh kembang anak serta eksploitasi pada anak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menganalisis bagaimana koordinasi antar lembaga dalam penanganan anak jalanan (anak *silver*) dengan menggunkan parameter Perda Kota Bandar Lampung No 02 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak, untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar lembaga dalam menangani maraknya anak *silver* disekitar kota Bandar Lampung menurut Handayaniingrat dalam Rukmayanti (2014 : 11) koordinasi memiliki ciri – ciri Tanggungjawab, Konsep Kesatuan Tindakan, Adanya proses ,Tujuan Koordinasi adapun faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2006) yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan anak melalui koordinasi tersebut. Berikut kerangka pikir peneliti dapat dilihat di bawah :



Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2022).

Gambar 2. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut (Maksum,2012) merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena, kondisi, atau variabel tertentu. Pendekatan kualitatif menurut Gunawan(2013), merupakan penelitian yang berusaha memahami serta menafsirkan makna dari suatu peristiwa, tingkah laku manusia, dan interaksi yang terjadi dalam situasi tertentu menurut sudut pandang dari peneliti itu sendiri dalam keadaan yang wajar berdasarkan sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan/*verstehen*.

Pendapat lain mengenai penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2019) merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, bersifat deskriptif serta lebih menekankan pada proses dan makna daripada *outcome*. Sugiyono juga menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif peneliti dijadikan sebagai instrument penelitian yang berinteraksi dengan sumber data melalui teknik pengumpulan data yang sifatnya triangulasi atau secara gabungan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara induktif sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memahami mengetahui, mendeskripsikan, dan menggambarkan bagaimana fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dalam Koordinasi Antar Lembaga dalam Upaya

Menanggulangi Eksploitasi Anak Ber-cat Perak (*silver*) melalui sebuah koordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penetapan fokus pada penelitian kualitatif ini memberi batasan pada ruang lingkup penelitian dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan terarah. Fokus pada penelitian ini memberikan batasan dalam lingkup studi dan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang menjadi tujuan awal dalam penelitian yang bersifat umum. Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah peneliti gambarkan sebelumnya yakni berfokus Pada Koordinasi antar Lembaga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Manusia Ber-cat Perak (*silver*) melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun fokus dari penelitian ini mengacu pada Teori Koordinasi menurut Handayani dalam Rukmayanti (2014 : 11) sebagai berikut :

1. Tanggungjawab yaitu bagaimana antar lembaga melakukan koordinasi. Karena koordinasi dikatakan berhasil apabila adanya wewenang dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban masing - masing lembaga terkait tugas fungsinya dalam menangani anak jalanan yaitu sebagai berikut :
 - Adanya konsistensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing lembaga dalam menangani anak jalanan.
 - Adanya evaluasi kinerja antar lembaga terkait dalam penanganan anak jalanan

2. Konsep Kesatuan Tindakan yaitu adanya kerjasama antar lembaga sehingga terdapat kesamaan atau keserasian agar terselenggaranya dengan sebaik-baiknya. Konsep kesatuan tindakan dalam koordinasi antar lembaga ialah upaya yang dilakukan lembaga terkait dalam menjaga koordinasi agar dapat melaksanakan penanganan anak jalanan dengan tindakan yang sama dengan tujuan yang sama.
 - adanya upaya sinergi antar lembaga dalam menangani anak silver
 - adanya keserasian atau kesamaan dalam mencapai tujuan yang sama.
3. Adanya proses yaitu merupakan suatu proses kerja yang dilakukan terus menerus yang bersifat kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam penelitian ini proses kerja merupakan proses koordinasi yang dilakukan oleh lembaga - lembaga terkait dalam penanganan anak jalanan.
 - Adanya proses koordinasi secara formal dan nonformal masing - masing lembaga terkait
 - Adanya upaya yang dilakukan lembaga terkait dalam penanganan anak jalanan sehingga tercapainya tujuan koordinasi antar lembaga dalam penanganan anak jalanan.
4. Tujuan Koordinasi yaitu adanya tujuan bersama antar lembaga untuk melaksanakan tugas fungsi masing - masing lembaga untuk bekerjasama sehingga tercapainya tujuan bersama. Dalam penelitian ini tujuan koordinasi ialah sebagai berikut :
 - Menganalisis capaian yang telah dilakukan antar lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga terkait.
 - Terlaksananya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan lembaga terkait dalam mencapai tujuan bersama yaitu penanganan anak jalanan.

Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi menurut Hasibuan (2006) yaitu:

- a. Kesatuan Tindakan yaitu kesatuan dari pada usaha setiap kegiatan lembaga sehingga terdapat keserasian dalam mencapai hasil, kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur waktu sehingga dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kesatuan tindakan dalam koordinasi artinya dalam penanganannya lembaga terkait harus sepakat akan ditangani dengan tindakan yang sama.
 - Adanya kerjasama antar lembaga dalam menangani anak jalanan
 - Memiliki tujuan yang sama yaitu penanganan anak jalanan.

- b. Komunikasi yaitu adanya hubungan antar lembaga dengan demikian komunikasi memiliki hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya memiliki peranan dalam menciptakan komunikasi. Dalam hal ini lembaga atau instansi diharapkan melakukan komunikasi dengan sesama lembaga yang berkaitan agar tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga yang terlibat dapat saling memberi informasi tentang penanganan anak jalanan juga kendala-kendala yang dihadapi masing-masing.
 - Adanya alur atau kejelasan informasi yang diterima antar lembaga dalam penanganan anak jalanan

- c. Pembagian Kerja untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi, pembagian kerja juga diartikan sebagai perincian tugas agar setiap individu dalam organisasi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas. Karena dalam penanganan anak jalanan melibatkan beberapa lembaga maka harus adanya pembagian

tugas yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

- Adanya pembagaan kerja antar lembaga terkait sesuai dengan tupoksi masing masing.
- d. Disiplin yaitu menyangkut pada sifat dan tingkahlaku apakah itu peorangan atau kelompok untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan untuk meningkatkan kesadarn dan kesedediaan menaati peraturan organisasi dan norma – norma sosial yang berlaku.
- Disiplin dalam penanganan anak jalanan berarti bahwa lembaga-lembaga terkait dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.
 - Adanya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam penanganan anak jalanan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didasarkan karena masih maraknya kegiatan Manusia Ber-cat Perak (*silver*) ini disepanjang ruas Kota Bandar Lampung padahal sudah terdapat kebijakan yang melarang adanya kegiatan ini. Selain itu, lokasi penelitian yang merupakan tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data diambil yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung. Dan berdasarkan hasil observasi penulis pada pihak diatas yang menyatakan sedang melakukan upaya penanggulangan fenomena manusia silver ini secara bertahap.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang

di dapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak di teliti.

b. Wawancara

Menurut (Moloeng, 2016, hal. 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Tabel 2. Data Informan

No	Informan	Informasi
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Bandar Lampung	Peranan pelaksana dan pengelola Bidang Sosial Anak, Lanjut Usia, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Bandar Lampung	Peranan pelaksana dan pengelola Bidang Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial
3.	Kepala Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL.PP Kota Bandar Lampung	Peranan pelaksana dan pengelola Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Pekerja Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	Peranan pelaksana dan pengelola Seksi Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Pekerja Perempuan dan Anak
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peranan dalam perlindungan anak jalanan : manusia silver
6	Masyarakat dan Anak Bercat Perak	Peranan sebagai sasaran subjek kebijakan

Sumber: Dibuat oleh peneliti (2022).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diberikan berupa dokumen, arsip dan catatan yang diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yaitu catatan atau arsip yang dipublikasikan

maupun yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi pada lokasi penelitian untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Dokumentasi yang dimaksudkan peneliti adalah dokumen atau berkas penunjang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016). Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini melakukan observasi dengan mendeskripsikan Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi fenomena manusia silver sebagai pengemis jalanan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi tertentu dan dilakukan oleh dua pihak. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2016) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu seperti perekam suara, buku, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Menurut Sudarwan (Djaelani, 2013) terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan berdasarkan strukturnya pada penelitian kualitatif terdapat dua jenis wawancara yaitu:

Wawancara tertutup adalah wawancara yang berfokus pada suatu topik tertentu dan umum yang dibantu dengan pedoman wawancara yang dibuat secara rinci. Wawancara terbuka adalah peneliti memiliki kebebasan untuk berbicara secara luas dan mendalam dalam kegiatan wawancara. Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka, karena peneliti ingin memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa foto, tulisan, gambar, catatan, buku, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Mengkaji suatu dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki suatu data yang berasal dari dokumen, *file*, maupun catatan dan hal-hal lain yang dapat didokumentasikan. Melalui kajian dokumen ini akan mempermudah peneliti dan jika terjadi kesalahan mudah untuk diganti karena narasumbernya tidak berubah. Untuk mempermudah kerja di lapangan, hal pertama yang dilakukan yaitu membuat pedoman dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data menurut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014:14) yaitu, *Data Condensation, Data Display, Conclusion Drawing/Verifications*.

3.6.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dengan demikian data yang diperoleh banyak dan bervariasi. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan Koordinasi Antar Lembaga dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan manusia bercat Perak (*silver*). Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan yang sudah ditentukan

oleh peneliti. Serta melakukan dokumentasi berupa foto pada setiap kegiatan yang dilakukan, baik saat observasi maupun wawancara.

3.6.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini artinya data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam penelitian ini data yang direduksi yaitu pada faktor penghambat dan pendorong Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan manusia bercat perak (*silver*).

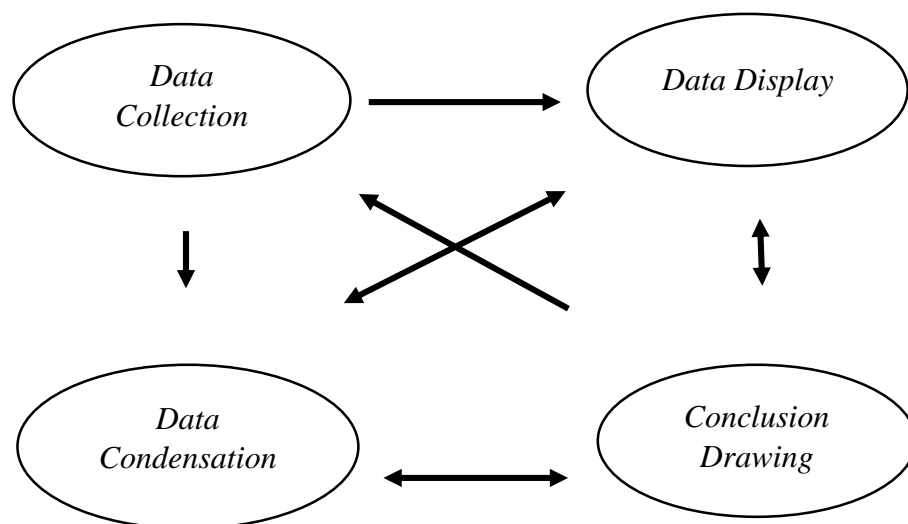
3.6.3 Penyajian Data (*Display Replay*)

Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian besar dari penelitian, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penelitian ini penyajian datanya diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto atau gambar, tabel, dan sejenisnya untuk menjelaskan faktor koordinasi antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan manusia bercat perak (*silver*).

3.6.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Penelitian ini menarik kesimpulan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang berdasarkan jenis data primer dan sekunder, sehingga diperoleh jawaban tentang koordinasi antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi eksploitasi anak s jalanan manusia bercat perak (*silver*). Berikut bagan model interaktif dalam analisis data:



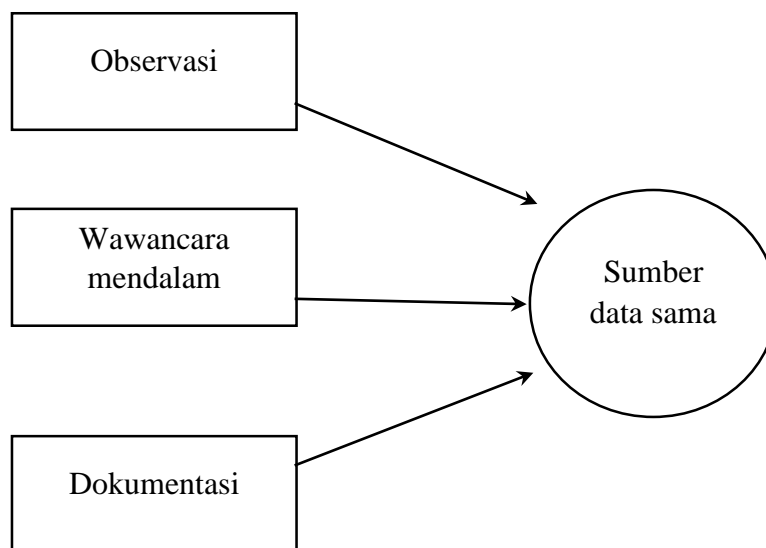
Gambar 3. Model analisis interaktif Miles dan Huberman

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan pengujian *dependability*.

3.7.1 Triangulasi

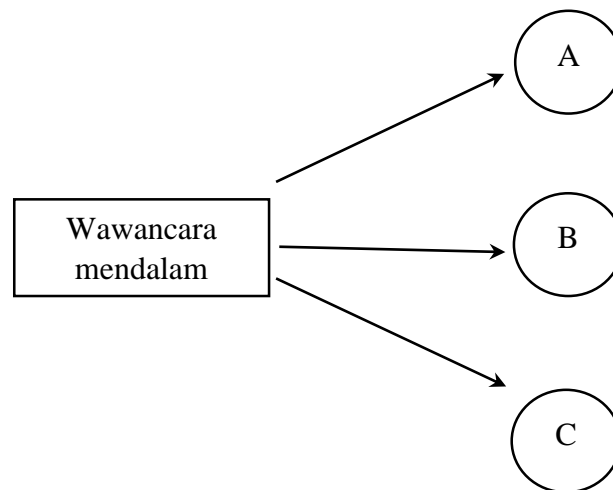
Triangulasi teknik, yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dari sumber data yang sama dan serempak sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Berikut gambar triangulasi teknik:



Gambar 4. Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Bermacam-macam cara pada sumber yang sama).

- b. Triangulasi sumber, teknik keabsahan data ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Adapun teknik triangulasi sumber yang ditempuh yaitu, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan melalui wawancara teradap pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP Kota Bandar Lampung., dan Stakeholder terkait lainnya. Berikut gambar triangulasi sumber pada teknik keabsahan data:



Gambar 5. Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data (Satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C)

3.7.2 Dikusi

Dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan demikian, dalam penelitian ini pemeriksaan teman sejawat berarti pemeriksaan dengan cara mengumpulkan teman sejawat (teman mahasiswa jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 dan beberapa angkatan 2016 yang mengambil penelitian kualitatif) yang memiliki pengetahuan umum luas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil menyediakan pandangan kritis, sebagai pembanding, dan membantu mengembangkan langkah berikutnya.

3.7.3 Pengujian dependability

Teknik ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Untuk pengujian dependability dilakukan oleh dosen pembimbing selama proses bimbingan berlangsung dengan memeriksa aktivitas penelitian ditunjukkan dengan bukti yang dimiliki oleh peneliti.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Koordinasi antar lembaga dalam penanganan Anak Jalanan (Anak Silver) dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pelaksanaan program anak jalanan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pelaksanaan program penanganan anak jalanan telah terlaksanakan dimana dalam pelaksanaannya terdapat koodinasi antar lembaga terkait yaitu Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Koordinasi penanganan anak jalanan dapat dilihat dari indikator koordinasi yaitu Tanggung Jawab, Kesatuan Tindakan, adanya proses, dan Tujuan koordinasi. Berdasarkan keempat indikator tersebut koordinasi yang dilaksanakan oleh lembaga terkait telah terlaksanakan dimana adanya tanggung jawab dari masing masing lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, adanya satuan tindakan dimana lembaga terkait memiliki tujuan yang sama yaitu menangani masalah anak jalanan, indikator ketidak adanya proses dimana lembaga terikait menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan yang keempat tujuan koordinasi dapat dilihat bahwa lembaga yang berkoordinasi telah melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama namun pada pelaksanaanya permasalahan anak jalanan masih belum bisa terselesaikan karena kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan yang dimiliki dinas terkait.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi, untuk mengetahui keberhasilan koordinasi maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu kesatuan tindakan dimana dalam pelaksanaan koordinasi penanganan anak jalanan lembaga terkait memiliki keserasian satu tujuan yaitu menanggulangi masalah anak jalanan, selanjutnya komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, adanya pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, dan disiplin dimana lembaga terkait telah bekerja sesuai dengan peraturan, dan norma-norma yang sudah diatur.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah ada koordinasi yang dilakukan antar lembaga namun sampai saat ini permasalahan anak jalanan belum dapat terselesaikan karena kurangnya sarana dan prasarana, banyaknya program yang dilaksanakan oleh lembaga terkait sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah membuat program terkait anak jalanan, diberikan fasilitas sekolah gratis bagi anak kurang mampu dan diberikan tempat tinggal yang layak bagi anak gelandangan.
2. Sebaiknya Dinas Sosial menambahkan SDM untuk berfokus melakukan penanganan anak jalanan.
3. Membuat kesepakatan dan membuat regulasi yang komprehensif untuk lebih jelas dalam pelaksanaan program anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adi Fahrudin. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama Agus
- Agus Sjafari. (2014). *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Pangerang Moenta. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Anggara Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia: Bandung
- Astutik, Sri. (2014). *Rehabilitasi Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Astri, H. (2014). *Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang*. Jurnal Aspirasi, 5(2), 145–155
- Bambang Rustanto. (2014). *Sistem Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 “*Dasar-dasar manajemen*” Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryanto, Bagon & Sutina. (2005). *Metodel Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Pranada Media Group

Sumber Jurnal:

- Fatmawati. 2017. *Fungsi Dinas Sosial dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firdaus.2018. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di fly over Kota Makasar*.Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Sri Wahyuni Noviyanti. *Strategi Manusia Perak Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi pada Manusia Perak di Pasar Kemiri Muka, Kota Depok)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. 2021.
- Darmawan, T. R. (2013). *Presentasi diri pengamen silver man di kota bandung*. 1–12. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/629/jbptunikompp-gdl-tossarahma-31425-12-unikom_t-1.pdf
- Guntara, M. A., Studi, P., & Luar, P. (2021). *Dampak eksploitasi anak dalam bidang pendidikan (kasus anak penjual asongan di kota Palembang) skripsi*.
- Darmawan, T. R. (2013). *Presentasi diri pengamen silver man di kota bandung*. 1–12. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/629/jbptunikompp-gdl-tossarahma-31425-12-unikom_t-1.pdf
- Guntara, M. A., Studi, P., & Luar, P. (2021). *Dampak eksploitasi anak dalam bidang pendidikan (kasus anak penjual asongan di kota Palembang) skripsi*.
- Mambang, & Wahyudi, H. (2016). Implementasi Kebijakan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 3(2), 1–8.
- Ningtyas, M. C., & Erianjoni, E. (2022). *Kebertahanan Remaja Pengemis Silver di Kota Padang*. 5, 47–54.
- Rachmawati, V., Faedlulloh, D., & Faedlulloh, D. (2021). *Journal of Political Issues Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*. 2, 67–78.
- Sustainable, P., & Goalds, D. (n.d.). *No Title*.
- Syamsul Arifin. (2017). *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Soaial Kota Bandar Lampung*. 81
- Indarto, T. K. (2020). *Koordinasi Antar Instansi dalam Revitalisasi Alun-Alun di Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(2), 28-38.

Afrizal, S., & Risdiana, R. (2022). Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9207-9215.

Sumber Dokumen:

Undang Undang, R. I. Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Undang-Undang, RI nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016

Sumber Internet:

Paulus, Mujiran. Investor id. (2021). Manusia silver di tengah pandemi. <https://investor.id/opinion/267377/manusia-silver-di-tengah-pandemi>. Diakses pada 12 Maret 2022

Heru Cahyo Romadhon. (2021). Mengenal lebih dekat manusia silver. <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-lebih-dekat-fenomena-anak-jalanan-manusia-silver>. Diakses 12 Maret 2022

Voi bernas. (2021). Manusia Silver Beranak: Pandemi, Eksploitasi Anak, dan Sikap *Radiohead*. <https://voi.id/bernas/89703/manusia-silver-beranak-pandemi-eksploitasi-anak-dan-sikap-radiohead>. Diakses 12 Maret 2022

Kumparan news. (2021). Asal usul Manusia Silver yang dilakoni bayi sampai pensiunan polri. <https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-manusia-silver-yang-dilakoni-pensiunan-polri-hingga-bayi-1wcKbadMtbc>. Diakses 14 Maret 2022

Ichsan Suhendra. Isran Berlian. Vivaid.(2021) Ramai Manusia Silver, Apakah berdampak pada tubuh?. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1425352-ramai-manusia-silver-apakah-berdampak-bagi-kesehatan-tubuh>. Diakses 14 Maret 2022

Ali Khomsan. Media Indonesia. (2021). Manusia *silver* dan Kemiskinan. <https://mediaindonesia.com/opini/437541/manusia-silver-dan-kemiskinan>.

Diakses 14 Maret 2022.

Nindi Anjani. *Yoursay*. (2021). Polemik Manusia Silver yang menuai Pro dan Kontra. <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/11/17/164918/polemik-manusia-silver-yang-menuai-pro-dan-kontra>. Diakses 14 Maret 2022.

Arif Abdurahman. (2021). Satpol PP Kaget, Penghasilan Manusia Silver Ternyata Bisa Lebih Tinggi dari Gaji PNS. <https://artikel.rumah123.com/satpol-pp-kaget-penghasilan-manusia-silver-ternyata-bisa-lebih-tinggi-dari-gaji-pns-116699>. Diakses pada 25 Maret 2022

Griska Laras. (2020). 5 Fakta Manusia Silver berawal amal jadi sumber rezeki. <https://www.urbanasia.com/5-fakta-manusia-silver-berawal-dari-amal-jadi-sumber-mata-pencaharian-U18265>. Diakses pada 25 Maret 2022

Kevin Andreas. (2020). Manusia Silver di Persimpangan Jalan Lampu Merah. <https://www.ussfeed.com/manusia-silver-berapa-penghasilannya-cat-apa-yang-digunakan/>. Diakses pada 25 Maret 2022

Andrian Saputra. (2020). Mengemis Ala Manusia Silver. <https://www.republika.id/posts/20891/mengemis-ala-manusia-silver>. Diakses pada 20 April 2022

CNN Indonesia. (2021). Viral Pensiunan Polri jadi Manusia Silver di Semarang. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210926144155-20-699620/viral-pensiunan-polri-jadi-manusia-silver-di-semarang>. Diakses pada 20 April 2022

Covesia. (2021). Anak dalam Lingkaran "Manusia Silver," Antara Kebutuhan Hidup dan "Kepedulian yang Ambigu". <https://covesia.com/news/113703/anak-dalam-lingkaran-manusia-silver-antara-kebutuhan-hidup-dan-kepedulian-yang-ambigu>. Diakses pada 20 April 2022

Kompas Tv. (2022). Satpol PP tertibkan Manusia Silver dan Gelandangan. <https://www.kompas.tv/article/217394/satpol-pp-tertibkan-manusia-silver-dan-gelandangan> . Diakses Pada 12 Mei 2022

Pardiana, Eva. (2022). Selama Juni 2022, Satpol PP Tertibkan 30 Anjal dan Manusia Silver di Bandar Lampung. Dalam <https://kabarsiger.com/read/selama-juni-2022-satpol-pp-tertibkan-30-anjal-dan-manusia-silver-di-bandar-lampung>. Diakses Pada 1 Desember 2022.